

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Yunisa Rahma Arifiyanti

NPP. 31.0669

Asdaf Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Keuangan Publik

yunisa.arifiyanti@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Komedi, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the issue that behind the Local Government Financial Statements (LKPD) of Balikpapan City labeled with an Unqualified Opinion (WTP) for the past 3 years, there are still some significant findings related to the implementation of government accounting standards but do not affect the fairness of its presentation of LKPD. **Purpose:** This study aims to determine whether the implementation of government accounting standards affects the quality of local government financial statements in Balikpapan City, East Kalimantan Province, and to what extent the impact is. **Method:** The method used in this study is a descriptive quantitative method with descriptive and inferential analysis aided by SPSS 27.0 to address the research questions. Data collection is facilitated through the administration of research questionnaires, which are the result of operationalizing variables X and Y, to 89 respondents representing the research population. Additionally, documentation supports the data collection process. **Result:** Based on the results of inferential analysis through simple linear regression and T-test hypothesis, the variable Implementation of Government Accounting Standards (X) has a significant impact on the variable Quality of Local Government Financial Statements (Y) in Balikpapan City, East Kalimantan Province. This is evidenced by the calculated t-value for variable X being greater than the critical t-value ($10.172 > 1.988$), and is expressed through the equation $Y = 24.582 + 0.713X$. This implies that any changes in the independent variable will result in changes in the dependent variable as well. It indicates that the more compliant Government Accounting Standards (GAS) are applied in the preparation of Local Government Financial Statements, the higher the quality of those financial statements. **Conclusion:** The implementation of government accounting standards influences the quality of local government financial statements in Balikpapan City, East Kalimantan Province, by 54.3%. The remaining 45.7% is influenced by other variables not explained in this study. Therefore, the researcher suggests that the Balikpapan City Government, especially the Regional Financial and Asset Management Agency as the accounting entity and the local government accounting entity authorized to prepare Consolidated Local Government Financial Statements, should maintain or enhance their competence and understanding of the implementation of Government Accounting Standards (GAS) during the preparation of local government financial statements. They should also pay more attention to the applicable accounting policies to maintain an Unqualified Opinion (WTP) and to ensure the creation of quality, effective, efficient, transparent, and accountable local financial management.

Keywords: Financial Reports, Local Government, Influence, Government Accounting Standards.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan bahwa di balik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan yang berlabelkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun terakhir, nyatanya masih menyimpan beberapa temuan yang signifikan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan namun tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPDnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan seberapa besar pengaruhnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan inferensial yang dibantu dengan aplikasi SPSS 27.0 untuk menjawab rumusan masalah dengan teknik pengumpulan data berupa pemberian kuesioner penelitian yang merupakan hasil penjabaran dari operasionalisasi variabel X dan Y terhadap 89 responden yang mewakili populasi penelitian dan juga didukung dengan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil analisis inferensial melalui uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis T, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan t hitung dari variabel X menunjukkan nilai yang lebih besar dari > t tabel ($10.172 > 1.988$), dan dinyatakan melalui persamaan $Y = 24,582 + 0.713X$. yang berarti setiap adanya perubahan pada variabel bebas, maka akan terjadi perubahan pada variabel terikat pula. Hal ini menunjukkan jika semakin taat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka laporan keuangan tersebut menjadi semakin berkualitas. **Kesimpulan:** Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 54,3%, sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Balikpapan terkhusus Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi sekaligus PPKD yang berwenang untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi untuk mempertahankan atau meningkatkan lagi kompetensi serta pemahamannya mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan lebih memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Pengaruh, Standar Akuntansi Pemerintahan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu pilar utama kokohnya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kebijakan. Akuntabilitas berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “Amanah” merupakan satu kata yang tepat untuk mendefinisikan akuntabilitas, artinya setiap pemangku kebijakan yang amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya (Mahmudi, 2019:2). Setiap rupiah uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah berkontribusi untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan.

Reformasi di bidang keuangan pemerintah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap kementerian dan atau lembaga serta satuan kerja mulai dari instansi di lingkungan pemerintah pusat hingga ke bawahnya, termasuk pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis secara transparan kepada publik yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 menyatakan bahwa gubernur/bupati/wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu: Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Kepatuhan terhadap peraturan perundangan; Efektivitas sistem pengendalian internal; dan Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK harus memastikan pencatatan angka-angka antara lain pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang dan ekuitas dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kesesuaian dimaksud termasuk definisi, pengakuan dan pengukuran nilai rupiah suatu transaksi.

Standar akuntansi diperlukan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang dihasilkan belum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya instansi pemerintah yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa temuan oleh audit, baik audit internal maupun audit eksternal. Salah satu pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa koreksi terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Pemerintah Kota Balikpapan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Selama 3 tahun anggaran terakhir pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya sehingga berhasil mempertahankan opini WTP yang diberikan oleh BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Namun, fakta mengatakan bahwa masih ada beberapa temuan permasalahan yang signifikan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

Tabel 1. 1
Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kota Balikpapan T.A. 2020-2022

Tahun	Opini	Temuan Permasalahan
2020	WTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelebihan setor PPN sebesar Rp76,80 juta atas pengadaan barang penanganan COVID-19 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan 2. Indikasi kekurangan penyetoran atas pungutan dan/atau potongan pajak negara TA 2019 dan TA 2020 dari transaksi SP2D-LS pada Pemkot Balikpapan sebesar Rp3,43 miliar.

2021	WTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat potensi pendapatan denda yang tidak diterima minimal sebesar Rp1.168.374.879,00 pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan 2. Terdapat kelebihan pembayaran atas biaya akomodasi perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp1.166.839.028,00 3. Kekurangan Volume Pekerjaan asphalt sheet pada DPUPR Sebesar Rp1.048.379.982,04.
2022	WTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pendapatan dan piutang retribusi pelayanan pasar yang belum memadai sehingga mengakibatkan kurang saji pendapatan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.79.210.000,00 2. Potensi pendapatan retribusi pelayanan pasar tidak tertagih dan piutang per 31 Desember 2022 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya senilai Rp.392.380.000,00 3. Kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mencerminkan realisasi yang sebenarnya dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp.1.066.000.000,00 4. Pengelolaan kas di bendahara pengeluaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang tidak sesuai ketentuan yang ditunjukkan dengan saldo kas per 31 Desember 2022 tidak mencerminkan saldo kas riil sebesar Rp.87.700.000,00 5. Sisa dana BOS regular senilai Rp.519.520.000,00 yang tidak digunakan secara optimal dan tidak adanya rencana penggunaan yang jelas dari Silpa dana BOS tersebut

Sumber : www.balikipapan.go.id, IHPD BPK Kaltim, dan diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan hasil audit pada Tabel 1.1 di atas, nyatanya laporan keuangan pemerintah Kota Balikpapan masih memiliki beragam catatan yang menjadi temuan karena sistem pencatatan yang belum sesuai dengan standar akuntansi, seperti piutang daerah yang tidak tertagih tapi belum dihapuskan dan kelebihan maupun kekurangan dalam penyeteroran. Hal ini mencerminkan pencatatan terhadap laporan keuangan yang belum tertata dengan baik sesuai dengan pedoman standar akuntansi pemerintahan.

Motivasi penelitian ini dilakukan terdorong oleh fenomena yang menunjukkan bahwa dibalik LKPD yang telah diberi label opini WTP oleh BPK, nyatanya masih menyimpan beragam catatan terkait permasalahan pengelolaan keuangan khususnya penerapan standar akuntansi yang telah disebutkan sebelumnya. Lantas, seberapa besar permasalahan atas penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks standar akuntansi pemerintahan maupun konteks kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Mayang Wulandari, 2018, berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi di SKPD Kabupaten Solok Selatan” menunjukkan bahwa

penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya penelitian oleh Dian Hidayat, Marta Sari, dan Firdaus AR, 2021, berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir” menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Indragiri Hilir. Adapun penelitian oleh Edwin Setiono, 2019, yang berjudul “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, SKPD Kota Bandung” menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut penelitian oleh Widya Mutiara Ningrum, 2019, yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, SKPD Kabupaten Magelang” menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif. Sedangkan, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian serupa oleh Galih Supraja, 2019, berjudul “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Efektivitas Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang” memperlihatkan hubungan linier positif dan berhubungan cukup erat antara implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap kinerja keuangan. Selain itu, adapun penelitian kualitatif dengan topik yang sama oleh Rizqi Sukma Sari Putri, 2023, yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara” menyimpulkan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu, khususnya oleh BPKAD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, namun masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan anggaran pada setiap OPD. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zeyn, 2011, berjudul “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan” menunjukkan hal lain yaitu bahwa implementasi tata kelola yang baik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Namun, implementasi standar akuntansi pemerintahan secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, penelitian oleh Nonik Susanti, 2016, dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, SKPD Kota Batu” juga menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batu. Lebih lanjut, penelitian oleh Astika Rahmawati, Wayan Mustika, Lilik Handayani Eka, 2018, yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan” menunjukkan bahwa aplikasi standar akuntansi pemerintah, utilisasi teknologi informasi, dan sistem kontrol intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Dan yang terakhir, penelitian oleh Hartono serta Ramdany, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020, dengan judul “Pengaruh SAP, SPI, serta Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan” mengungkapkan bahwa SAP, Efektivitas SPI, dan SDM secara parsial serta secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana perbedaannya terletak pada lokus penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya yaitu di Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori yang berbeda dari beberapa penelitian yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kieso, Weygandt, dan Warfield dalam bukunya yang berjudul *Intermediate Accounting* (2011:65) pada variabel X dimana standar akuntansi pemerintahan dijabarkan ke dalam 4 dimensi yakni Pengukuran, Pengakuan Pendapatan, Pengakuan Beban, dan Pengungkapan Penuh yang tentunya akan sangat mempengaruhi hasil penelitian.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan seberapa besar pengaruhnya.

II. METODE

Untuk memperoleh tujuan yang telah ditetapkan pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif merupakan jenis metodologi penelitian yang mengacu berdasarkan nilai positivisme yang meneliti populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian untuk pengumpulan data, dan menggunakan analisis data kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan variabel dalam penelitian ini yaitu variabel standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel X dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel Y, penelitian ini merupakan penelitian kausatif. Bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel X mempengaruhi variabel Y. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian yang berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2017).

Penulis mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner dan didukung melalui studi dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis menyebarkan kuesioner kepada 89 sampel/responden yang telah ditentukan yang merupakan pegawai di bagian keuangan pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Balikpapan yang mencakup Kasubag Keuangan, Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf Keuangan dan sebagainya. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan membaca LKPD Kota Balikpapan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Timur yang ada di website resmi Pemerintah Kota Balikpapan, serta data IHPD Semester I BPK RI Tahun 2023 dan data IHPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023. Setelah itu data dianalisis dengan analisis deskriptif dan inferensial yaitu analisis regresi linier sederhana dan uji hipotesis t dengan bantuan aplikasi SPSS 27.0 untuk memperoleh tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil data kuesioner yang terkumpul selanjutnya diolah oleh penulis menggunakan bantuan aplikasi

program SPSS 27.0 dan dianalisa melalui analisis deskriptif kuantitatif dan tahapan uji analisis inferensial untuk mencapai tujuan penelitian.

Adapun teknik statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis hasil jawaban responden pada tiap-tiap pernyataan yang mewakili suatu indikator dalam variabel melalui kriteria interpretasi presentase skor tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 2
Kriteria Interpretasi Presentasi Skor

Interval Presentase (%)	Kategori
20%- 36%	Sangat Buruk
>36% - 52%	Buruk
>52% - 68%	Cukup
>68% - 84%	Baik
>84% - 100%	Sangat Baik

Sumber : diolah oleh penulis, 2024

3.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kota Balikpapan (X)

Berikut ini merupakan tabel hasil tanggapan responden pada setiap item pernyataan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X) yang memiliki 4 dimensi yaitu pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh.

Tabel 3
Hasil Tanggapan Responden Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

No	Dimensi	Nilai Rata-rata	Interval	Kategori
1.	Pengukuran	85,83	>84%-100%	Sangat Baik
2.	Pengakuan Pendapatan	83,96	>68%-84%	Baik
3.	Pengakuan Beban	84,92	>84%-100%	Sangat Baik
4.	Pengungkapan Penuh	85,80	>84%-100%	Sangat Baik
	Rata-rata	85,12	>84%-100%	Sangat Baik

Sumber : Data primer diolah oleh penulis, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tanggapan responden pada keseluruhan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dipersepsikan sudah sangat baik yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata variabel standar akuntansi pemerintahan sebesar 85,12% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Dimensi tertinggi adalah pengukuran sebesar 85,83% sedangkan dimensi terendah adalah pengakuan pendapatan sebesar 83,96%. Hal ini juga mengindikasikan bahwa mayoritas responden setuju dengan persepsi tentang variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X) artinya mayoritas responden telah memiliki pemahaman yang baik tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan dimensi pengakuan pendapatan yang menjadi dimensi dengan skor tanggapan responden terendah, hal ini sejalan dengan temuan permasalahan yang terjadi pada tahun 2022 yakni sistem pencatatan piutang daerah yang tidak tertagih belum sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku oleh karena itu hal ini mencerminkan bahwa pegawai belum maksimal dalam menerapkan sistem pencatatan piutang yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan tentunya hal ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Balikpapan agar kedepannya tidak terjadi temuan permasalahan serupa.

3.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan (Y)

Selanjutnya di bawah ini merupakan tabel hasil tanggapan responden pada setiap item pernyataan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memiliki 4 dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Tabel 4.

Hasil Tanggapan Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

No	Dimensi	Nilai Rata-rata	Interval	Kategori
1.	Relevan	86,36	>84%-100%	Sangat Baik
2.	Andal	84,65	>84%-100%	Sangat Baik
3.	Dapat Dibandingkan	86,21	>84%-100%	Sangat Baik
4.	Dapat Dipahami	85,67	>84%-100%	Sangat Baik
	Rata-rata	85,72	>84%-100%	Sangat Baik

Sumber: Data primer diolah oleh penulis, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tanggapan responden pada keseluruhan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipersepsikan sudah sangat baik yang tercermin pada besarnya nilai rata-rata variabel standar akuntansi pemerintahan sebesar 85,72% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Dimensi tertinggi adalah relevan sebesar 86,36% sedangkan dimensi terendah adalah andal sebesar 84,65%. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden setuju dengan persepsi tentang variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) artinya mayoritas responden telah memiliki pemahaman yang baik tentang laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

3.3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

Pada sub bab ini, hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji dan dibuktikan dengan menggunakan rangkaian pengujian statistik hingga regresi linier sederhana. Hipotesis konseptual yang diajukan yaitu pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,582	6,016		4,086	,000
	X	,713	,070	,737	10,172	,000

a. Dependent Variable: Y

Gambar 1
Output SPSS Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa hasil uji untuk persamaan regresi dapat dilihat pada kolom Unstandardized B. Berdasarkan hasil tersebut, maka persamaan regresi linier yang terbentuk adalah $Y = 24,582 + 0,713X$ Model tersebut memiliki arti, yaitu: Konstanta (Constant) sebesar

24,582 menyatakan bahwa apabila tidak ada perubahan pada nilai Standar Akuntansi Pemerintahan (X), maka angka tersebut menunjukkan nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), yang berarti setiap adanya perubahan pada variabel bebas, maka akan terjadi perubahan pada variabel terikat pula. Setiap kenaikan variabel penerapan SAP sebesar satu satuan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,737 ^a	,543	,538	4,24074

a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y

Gambar 2
Output SPSS Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diperoleh koefisien determinasi $KD = R^2 \times 100\%$ adalah sebesar 0,543. Artinya sebesar 54,3% perubahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan SAP sedangkan sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel lain seperti kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) yang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,582	6,016		4,086	,000
	X	,713	,070	,737	10,172	,000

a. Dependent Variable: Y

Gambar 3
Output SPSS Hasil Uji Signifikansi dan Uji T

Berdasarkan tabel Coefficient di atas, dapat diketahui nilai Uji T, atau uji saat variabel bebas, secara masing-masing diuji dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil di atas, didapatkan nilai signifikansi (Sig. atau p-value) dari variabel X adalah sebesar 0.000. Berdasarkan hasil tersebut, nilai signifikansi variabel X berada di bawah 0.05, yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

Selain menggunakan nilai signifikansi, hubungan tersebut dapat dilihat melalui nilai t hitung yang dibandingkan dengan t tabel. Berdasarkan tabel di atas, nilai t hitung yang dihasilkan adalah 10.172, sedangkan nilai t tabel untuk sampel sebanyak 89 responden ($df = n - 2 = 89 - 2 = 87$) adalah 1.988. Sehingga, t hitung dari variabel X menunjukkan nilai yang lebih besar dari > t tabel ($10.172 > 1.988$), maka variabel Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) atau terjadi penolakan H_0 .

- a. H_a = Ada pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan (**diterima**).

- b. H_0 = Tidak ada pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan (**ditolak**).

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mayang Wulandari (2018) yaitu, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Solok Selatan dan juga penelitian oleh Nonik Susanti (2016) yakni, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Batu walaupun menggunakan teori yang berbeda. Pada PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur hubungan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan, yang menyatakan bahwa seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintahan dapat memberikan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyusun laporan keuangannya telah berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah Kota Balikpapan telah sepenuhnya disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku guna mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang selalu diperoleh pemerintah kota Balikpapan pada setiap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK selama beberapa tahun terakhir. Meskipun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa temuan permasalahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan, hal tersebut tidaklah mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangannya dikarenakan temuan tersebut tidak berdampak material atau menimbulkan kerugian negara. Namun, hal ini tentunya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan pada kebijakan akuntansi yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 54,3%, sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Balikpapan terkhusus Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi sekaligus PPKD yang berwenang untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan lagi kompetensi serta pemahamannya mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan lebih memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku agar kedepannya tidak ada lagi temuan mengenai permasalahan penerapan standar akuntansi serta dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, tenaga dan kemampuan peneliti. Selain itu juga adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pernyataan pada kuesioner yang diberikan dan juga kejujuran dalam mengisi kuesioner sehingga ada kemungkinan hasil yang didapatkan kurang akurat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, yaitu hanya ada satu variabel bebas yang dijelaskan dalam penelitian ini sehingga masih banyak variabel lain yang belum dijelaskan dalam penelitian ini oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD namun dengan tambahan variabel bebas lain yang mempengaruhi seperti Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk menemukan hasil yang lebih spesifik dan mendalam. Dan juga, kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data, maka diharapkan adanya penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan metode penelitian yang berbeda, sampel yang lebih luas, dan penggunaan instrumen penelitian yang berbeda dan lebih lengkap.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang telah meluangkan waktu, arahan, do'a, motivasi dan semangat secara moril kepada penulis. Secara khusus kata terimakasih diucapkan dari lubuk hati terdalam kepada kedua orang tua penulis serta keluarga besar dan teman dekat yang selalu menjadi motivator terbesar selama menjalani pendidikan di Kampus IPDN.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga ditujukan kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang telah memfasilitasi penulis untuk melakukan penelitian di wilayahnya dan secara khusus kepada seluruh ASN Kota Balikpapan yang turut berpartisipasi sebagai responden dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak Drs. Komedi, M.Si selaku Dosen Pembimbing dan seluruh dosen penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Tak lupa juga kepada Orang Tua penulis yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hartono dan Ramdany. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). Pengaruh SAP, SPI, serta Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. DOI:10.37932/ja.v9i1.90
- Hidayat, Dian. Marta Sari dan Firdaus. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. <https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/download/6816/3223>
- Kieso, Warfield, Weygandt. (2011). Intermediate Accounting Volume 1. New York: IFRS.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 4 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mutiara Ningrum, Widya. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Magelang. <http://repositori.unimma.ac.id/674/>
- Putri, Rizqi Sukma. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. http://eprints.ipdn.ac.id/view/creators/sukma_sari_putri=3Arizqi=3A=3A.html
- Rahmawati, Astika. Mustika, Wayan dan Handayani, Lilik. (2018). Pengaruh Penerapan Standar

- Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. DOI: <https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1097>
- Setiono, Edwin. (2019). Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah di SKPD Kota Bandung. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2183>
- Sinurat, Marja. (2018). Akuntansi Keuangan Daerah. 1 ed. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supraja, Galih. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Efektivitas Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/577>
- Susanti, Nonik. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, SKPD Kota Batu. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166251>
- Wulandari, Mayang. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi di SKPD Kabupaten Solok Selatan. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3846/0>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 10(1), 52-62. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/497/521>

